

## KAJIAN PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)<sup>1</sup>

Krismiyati Tasrin dan Putri Wulandari

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I  
Lembaga Administrasi Negara  
Jl. Kiarapayung Km. 4,7, Jatinangor, Sumedang  
Email: chrissie\_tasrin@yahoo.com, pu3\_wulandari@yahoo.com

### **Abstract**

*After more than 10 years of the implementation of decentralization policy in Indonesia, it is considered essential to evaluate this policy in terms of improving public welfare. Decentralization in this study is measured by three dimensions: fiscal, functional and personnel. These three variables are not made in a single composite index, but in a separate index which include variables of economics, infrastructure, education, and health. Using panel data of 25 districts/cities in West Java Province in 2004-2010, the findings stated that: In the economic field, the effect of decentralization variables has not been demonstrated directly. However, there is indirect effect through the channel of investments variable, where the high level of investment in the region is justified as a form of improved local government performance in attracting investment. In infrastructure, personnel decentralization is the only variable that has an influence on the change of variable road infrastructure. Meanwhile, in the field of education, there are two variables of decentralization which have significant influence on the accessibility of the public to secondary education. Those two variables are functional and personnel decentralization. In the health sector, it was found that the decentralization variable has no significant effect on changes in the ratio of the number of physicians per 1000 population, but it has an influence on increasing the ratio of hospital beds to population. This shows that the channel of the decentralization variables that can have an impact on improving the public welfare is functional decentralization and personnel decentralization. However, the performance of both channels remains to be improved for the future.*

**Keywords :** Decentralization, Public Welfare

---

<sup>1</sup> Naskah diterima: 29 Agustus 2012  
Merupakan hasil dari Penelitian Mandiri pada Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I  
Lembaga Administrasi Negara Tahun 2012.

## Intisari

Setelah lebih dari 10 tahun kebijakan desentralisasi diimplementasikan di Indonesia, maka dianggap penting untuk melakukan evaluasi kebijakan ini dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dalam penelitian ini diukur dengan tiga dimensi: *fiskal*, *funksional* dan *personil*. Ketiga variabel ini tidak dibuat dalam indeks komposit tunggal, tetapi indeks yang terpisah yang meliputi variabel bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dengan menggunakan data panel dari 25 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada 2004-2010, temuan menyatakan bahwa: *Di bidang ekonomi*, variabel desentralisasi belum menunjukkan pengaruhnya secara langsung, baik dilihat dari variabel *desentralisasi fiskal*, *desentralisasi fungsional* maupun *desentralisasi personil*. Meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara ketiga variabel desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun disinyalir terdapat keterkaitan tidak langsung variabel ini melalui saluran (*channel*) investasi, dimana tingginya investasi di daerah dijustifikasi sebagai bentuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi. *Di bidang infrastruktur*, hanya variabel desentralisasi personil yang memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel infrastruktur jalan. *Di bidang Pendidikan*, terdapat dua variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas. Kedua variabel desentralisasi dimaksud adalah variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil. *Di bidang kesehatan*, ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk, tapi memiliki pengaruh terhadap rasio tempat tidur di Rumah Sakit terhadap penduduk. Dari sini terlihat bahwa saluran (*channel*) dari variabel desentralisasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil. Namun demikian kinerja kedua saluran (*channel*) inipun tetap harus ditingkatkan untuk kedepannya.

**Kata kunci:** Desentralisasi, Kesejahteraan Masyarakat

### A. PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi telah menjadi *trend* manajemen pemerintahan selama beberapa dekade terakhir setelah sebelumnya kebijakan sentralisasi mendominasi manajemen pemerintahan di banyak negara di dunia. Secara umum, desentralisasi didefinisikan sebagai pemberian (*transfer*) wewenang dan tanggung

jawab penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adapun alasan utama yang mendorong penggantian sistem sentralisasi dengan desentralisasi adalah karena pemerintah pusat dinilai gagal dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakatnya. Hal ini karena dalam sistem sentralisasi, pemerintah memberlakukan

penyeragaman (*uniformitas*) perlakuan (*treatment*) pada setiap daerah. Dan kebijakan “*one size fits all*” ini menyebabkan tidak terakomodasinya kekhasan yang dimiliki oleh setiap daerah, sehingga model kebijakan ini dipandang tidak mencerminkan kebutuhan lokal (Oates, 1972). Selain alasan tersebut, Bird dan Vaillancourt (1998) menyatakan bahwa kebijakan desentralisasi menjadi kebijakan populer akhir-akhir ini karena model kebijakan ini menjanjikan terjadinya: efisiensi ekonomi, efektivitas biaya program, akuntabilitas, peningkatan mobilisasi sumber daya, berkurangnya tingkat kesenjangan (*disparitas*), peningkatan partisipasi politik, serta penguatan demokrasi dan stabilitas politik.

Melalui desentralisasi, pemerintah daerah lebih banyak berperan dalam pembangunan karena mereka kini memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan masyarakat di wilayah yurisdiksinya. Karena pemerintah lokal dinilai memiliki pengetahuan (*knowledge*) yang lebih baik tentang kebutuhan (*needs*) dan preferensi (*preferences*) warga masyarakatnya, maka proses pembangunan dalam model kebijakan desentralisasi seharusnya menjadi lebih efisien daripada model kebijakan sentralisasi dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Hal ini karena dalam kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, secara teoritis, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa model kebijakan desentralisasi seharusnya mampu

membawa tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan bila dengan sistem sentralisasi (terpusat).

Di Indonesia, kebijakan desentralisasi sesungguhnya sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1945 tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Namun demikian, yang disebut sebagai “big bang” kebijakan desentralisasi di Indonesia memang baru dimulai sejak 1 Januari 2001, yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah telah menjadi “pemain utama” dalam pembangunan di daerah, termasuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Hirawan, S (2007) bahwa selain untuk memenuhi tujuan demokrasi, hal penting lainnya dari pemberlakuan kebijakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terminologi kesejahteraan masyarakat sendiri semestinya tidak didefinisikan dalam arti yang sempit, yang hanya sekedar menggunakan besaran PDRB (maupun PDRB per kapita) sebagai pendekatan (*proxy*), melainkan harus melibatkan beberapa indikator lain yang dinilai menjadi unsur-unsur pendukung konsep kesejahteraan masyarakat dalam arti luas. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, di dalam bagian penjelasan umum disebutkan bahwa “lapangan

kesejahteraan sosial adalah sangat luas dan kompleks, yang mencakup antara lain, aspek-aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja, kesejahteraan sosial dan lain-lain". Ditinjau dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penilaian tentang kesejahteraan memiliki 2 (dua) dimensi yaitu *dimensi fisik* dan *dimensi psikologis*. Mengingat *dimensi psikologis*, sifatnya sangat subjektif dan proses pengukurannya tidak mudah, maka kebanyakan studi lebih sering menggunakan *dimensi fisik* sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, saat ini banyak berkembang pengukuran kesejahteraan dari sudut pandang *dimensi fisik*, misalnya *Human Development Index* (Indeks Pembangunan Manusia), *Physical Quality Life Index* (Indeks Mutu Hidup); *Basic Needs* (Kebutuhan Dasar), dan lain sebagainya.

Secara teoritis, tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah harus lebih baik ketika kebijakan desentralisasi diimplementasikan mengingat kualitas informasi dan tingkat transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di era desentralisasi lebih baik dibandingkan dari saat era sentralisasi. Namun, meskipun desentralisasi tampaknya telah menjadi gaya manajemen pemerintah yang "menguntungkan" selama beberapa dekade terakhir, Bardhan dan Mookherjee (2005) menyebutkan bahwa pengaruh desentralisasi berbeda dari satu negara ke negara lain. Ini berarti bahwa kebijakan desentralisasi tidak dapat menjamin akan selalu membawa pengaruh positif karena hasil/pengaruhnya akan sangat

tergantung pada kondisi setempat. Dengan kata lain, desentralisasi tidak selalu efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Elhiraika (2007) menyebutkan bahwa alasan di balik fenomena ini adalah karena "*lack of commensurate revenue assignments, inadequate access to financial markets, and lack of necessary administrative capacity*".

Secara umum, terdapat 3 (tiga) aspek dari desentralisasi yaitu: *desentralisasi politik*, *desentralisasi administratif* dan *desentralisasi fiskal*. Saat ini, dilihat dari *aspek politik* dan *administratif*, tanggung jawab penanganan fungsi publik didistribusikan di antara beberapa tingkat pemerintahan: pusat, provinsi, kabupaten/kota. Di sini, sebenarnya "pemain utama" di era desentralisasi adalah tingkat pemerintahan kabupaten dan kota. Sementara, pemerintah provinsi berperan dalam hal koordinasi dan pengawasan lintas kabupaten/kota di bawah wilayahnya, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai regulator dan fasilitator. Selanjutnya, berkaitan dengan *aspek keuangan* atau *fiskal*, terdapat 4 (empat) komponen utama dari desentralisasi fiskal: "(1) tugas pengeluaran (*expenditure assignment*), (2) tugas pendapatan (*revenue assignment*), (3) sistem dana perimbangan (*intergovernmental system*), dan (4) penganggaran dan monitoring keuangan (*budgeting and fiscal monitoring*)".

Selama ini, studi kuantitatif tentang desentralisasi lebih banyak menggunakan pendekatan fiskal atau keuangan sebagai pendekatan (*proxy*). Namun, mengingat derajat otonomi pemerintah daerah yang berbeda, maka tidaklah tepat bila untuk mengukur

desentralisasi hanya dilihat dari *aspek fiskal* saja (Bird, dalam Hong, 2011). Zimmerman menyatakan bahwa desentralisasi seharusnya diukur tidak dari sebuah *single index* saja, tapi oleh *multiple indicator* yang saling berkaitan, yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu: *dimensi struktur, keuangan, fungsi, dan personnel* (ACIR, dalam Hong, 2011). Stephens (dalam Hong, 2011) juga mengajukan tiga dimensi yaitu *dimensi finansial, fungsi, dan personil* untuk mengukur derajat desentralisasi pemerintah daerah (*state government*) di Amerika Serikat.

Selanjutnya, setelah lebih dari 10 tahun kebijakan desentralisasi diterapkan di Indonesia, maka dipandang penting untuk melakukan evaluasi dan penilaian prestasi desentralisasi kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pengertian yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengukur bagaimana pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pelaksanaan kebijakan desentralisasi secara signifikan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah?
- 2) Melalui saluran (*channel*) apa kebijakan desentralisasi tersebut memberikan pengaruh pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat?

- 3) Apa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan dalam kerangka untuk mengefektifkan implementasi kebijakan desentralisasi yang selanjutnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## B. METODE PENELITIAN

### Objek Penelitian

Dalam kajian ini, yang menjadi objek penelitian sekaligus populasi adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 26 daerah. Namun demikian, Kabupaten Bandung Barat yang merupakan daerah yang dimekarkan pada tanggal 2 Januari 2007 dalam analisisnya akan digabungkan dengan Kabupaten Bandung yang merupakan kabupaten induknya. Hal ini dikarenakan penelitian ini secara keseluruhan akan menggunakan data panel kabupaten/kota se Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2004 dimana pada saat itu Kabupaten Bandung Barat masih tergabung dengan Kabupaten Bandung. Penggunaan data pada rentang tahun 2004 – 2010 ini dikarenakan penelitian ini memang menggunakan basis data pasca pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004.

### Variabel Penelitian

Dengan memperhitungkan kemungkinan atau *feasibilitas* dari sebuah pengukuran, maka variabel desentralisasi dalam penelitian ini diukur dengan 3 (tiga) dimensi. Pertama, derajat *Desentralisasi Fiskal* diukur dengan menggunakan *proxy*

persentase/rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah (*local revenue*). Hal ini karena implikasi pertama dari diberlakukannya kebijakan desentralisasi adalah bahwa sekarang setiap daerah otonom memiliki kewenangan untuk mencari sumber pendanaannya sendiri. Kedua, derajat *Desentralisasi Fungsional* diukur dengan persentase/rasio pengeluaran pemerintah daerah dari pengeluaran total pemerintah secara nasional. Sebagaimana dijelaskan oleh Hong (2011), sesungguhnya *proxy* yang paling akurat untuk mengukur *derajat desentralisasi fungsional* adalah persentase/rasio fungsi yang diemban oleh pemerintah daerah terhadap fungsi pemerintah total, namun demikian, data time-series dari *proxy* tersebut sulit untuk dikumpulkan, sehingga dalam penelitian ini digunakan pendekatan/*proxy* pengeluaran (*expenditures*). Ketiga, derajat *Desentralisasi Personil* diukur dengan persentase/rasio Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pusat. Hal ini mengingat, implikasi lain dari adanya transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti dengan transfer sumber daya berupa dana, sarana dan personil.

Selain variabel desentralisasi sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini juga digunakan variabel kontrol yang terdiri dari *Variabel Investasi* dan *Tenaga Kerja*. Variabel kontrol ini dibuat dalam rangka untuk melihat kemungkinan adanya variabel-variabel lain di luar variabel yang diteliti, yang dinilai akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Variabel

tenaga kerja dimaksud akan menggunakan *proxy* prosentase angkatan kerja yang telah bekerja. Hal ini dikarenakan variabel tenaga kerja disinyalir memiliki kontribusi dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah. Selanjutnya variabel investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio total Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap PDRB di suatu wilayah. Pemilihan variabel investasi dan variabel tenaga kerja sebagai variabel kontrol dikarenakan variabel ini disinyalir memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sebagaimana digunakan dalam penelitian Jing Jin dan Heng-fu Zou (2000).

Sementara itu, variabel dependen dalam penelitian ini adalah variabel-variabel terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang didefinisikan dalam pengertian luas, yang mencakup beberapa aspek seperti: *aspek ekonomi wilayah, aspek infrastruktur, aspek pendidikan dan aspek kesehatan*. Variabel yang menjadi *proxy* dari *aspek ekonomi wilayah* meliputi: *variabel PDRB per kapita*. Hal ini didasarkan atas logika bahwa variabel PDRB per kapita memberikan informasi mengenai seberapa banyak nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan di setiap daerah, sehingga merupakan indikator dasar untuk memahami kondisi ekonomi suatu daerah secara keseluruhan.

Terka it d e n g a n *aspek infrastruktur*, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *variabel pertambahan panjang jalan per kapita*. Variabel ini dinilai penting dalam menunjang terciptanya kesejahteraan

masyarakat di daerah. Hal ini mengingat tingkat kualitas aspek infrastruktur dapat berfungsi untuk merangsang atau justru mengganggu kegiatan-kegiatan ekonomi meskipun tidak secara langsung menghasilkan produk ekonomi. Dilihat dari teorinya, panjang dan kondisi jalan memang berhubungan erat dengan kenyamanan hidup setiap warga yang lebih jauh dapat dikaitkan dengan aspek kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya untuk mengukur *indikator pendidikan*, penelitian ini menggunakan *proxy* jumlah gedung sekolah per penduduk dan rasio murid terhadap guru untuk tingkat pendidikan SLTA. Variabel pertama menunjukkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap infrastruktur pendidikan tingkat menengah atas, sementara variabel kedua menunjukkan kualitas tingkat pendidikan dipandang dari sisi komposisi rasio guru terhadap murid. Kemudian, untuk mengukur *indikator kesehatan*, penelitian ini menggunakan *proxy* jumlah dokter per 1.000 penduduk dan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk. Di sini, jumlah dokter adalah indikator yang banyak digunakan untuk mewakili pembangunan layanan kesehatan. Sementara itu, jumlah tempat tidur di Rumah Sakit, meski terlihat tidak terkait langsung dengan pembangunan daerah, namun dapat dipastikan memiliki kaitan erat dengan tingkat kesejahteraan suatu wilayah.

Sama halnya dengan perlakuan pada variabel-variabel independen, penelitian ini juga tidak menghasilkan indeks gabungan/komposit untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal

ini didasarkan atas pemikiran bahwa jika perbedaan daerah tidak diukur dengan indikator tunggal melainkan diukur dengan berbagai indikator yang mewakili berbagai aspek, maka hal ini dinilai lebih persuasif untuk melihat berbagai aspek kesejahteraan masyarakat di daerah dibandingkan jika harus disusun dalam satu indeks gabungan/komposit tunggal.

### Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran, mengkaji dan menguji keberadaan teori secara empirik dari variabel-variabel *independent* yang mempengaruhi suatu variabel *dependent*. Metode analisis deskriptif disusun berdasarkan data sekunder, literatur, jurnal, makalah, artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam melakukan metode analisis kuantitatif dilakukan melalui pemodelan ekonometrika yang diinterpretasikan secara statistik. Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Program *Eviews*.

### Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel (*pooled data*) yaitu gabungan data yang terdiri dari data runtut waktu (*time series*) dan data silang tempat (*cross*

*section*) dari 26 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada periode 2004-2010 yang mewakili tahun-tahun pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber untuk mencari gambaran secara faktual, dimulai dengan melakukan kajian pustaka dan *review* hasil penelitian terkait, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang objek dan analisis yang akan dilakukan.

Sifat dari penelitian ini adalah kuantitatif, sehingga data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang berasal dari berbagai dokumen resmi pemerintah seperti Nota Keuangan, Laporan Bank Indonesia, dan Data Basis IPM. Adapun instansi yang mengeluarkan data tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Data mengenai penerimaan dan pengeluaran nasional berasal dari Nota Keuangan Kementerian Keuangan.
- 2) Data mengenai jumlah PNS daerah berasal dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), sedangkan data mengenai jumlah PNS nasional berasal dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
- 3) Data mengenai Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah, Tenaga Kerja, PDRB perkapita, Panjang jalan perkapita, Jumlah Sekolah SLTA, Jumlah Guru dan Murid tingkat SLTA negeri, jumlah

dokter dan jumlah tempat tidur di Rumah Sakit berasal dari data basis IPM Provinsi Jawa Barat.

- 4) Data tentang jumlah investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) diperoleh dari Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Barat.

### Model Penelitian

Pada umumnya, model yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model yang dikembangkan oleh Hong (2011) dengan beberapa penyesuaian dalam pendefinisian variabel independen yang digunakannya untuk mengukur derajat desentralisasi dan juga variabel dependen yang menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, secara matematis model yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 (enam) model, yang diformulasikan sebagai berikut:

- Untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi wilayah (*region economic disporty*) digunakan Model 1 :

$$Y = \hat{a}_1 + \hat{a}_2DFis + \hat{a}_3DFung + \hat{a}_4DP + \hat{a}_5Invest + \hat{a}_6TK + \hat{a} \quad (3.1)$$

- Untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang infrastruktur digunakan Model 2 :

$$PJ = \tilde{a}_1 + \tilde{a}_2DFis + \tilde{a}_3DFung + \tilde{a}_4DP + \tilde{a}_5Invest + \tilde{a}_6TK + \tilde{a} \quad (3.2)$$

- Untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap

kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan digunakan Model 3 dan Model 4 sebagai berikut :

$$SKLHPDDK = \hat{\epsilon}_1 + \hat{\epsilon}_2 DFis + \hat{\epsilon}_3 DFung + \hat{\epsilon}_4 DP + \hat{\epsilon}_5 Invest + \hat{\epsilon}_6 TK + \hat{a} \quad (3.3)$$

$$MG = \hat{a}_1 + \hat{a}_2 DFis + \hat{a}_3 DFung + \hat{a}_4 DP + \hat{a}_5 Invest + \hat{a}_6 TK + \hat{a} \quad (3.4)$$

· Untuk melihat pengaruh kebijakan desentralisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di bidang kesejatan digunakan Model 5 dan Model 6 sebagai berikut :

$$DRCap = \hat{n}_1 + \hat{n}_2 DFis + \hat{n}_3 DFung + \hat{n}_4 DP + \hat{n}_5 Invest + \hat{n}_6 TK + \hat{a} \quad (3.5)$$

$$TTIDPDDK = \hat{o}_1 + \hat{o}_2 DFis + \hat{o}_3 DFung + \hat{o}_4 DP + \hat{o}_5 Invesr + \hat{o}_6 TK + \hat{a} \quad (3.6)$$

Di mana: Ypcap = PDRB perkapita; PJcap= Panjang jalan berkualitas baik perkapita; DRcap = Rasio dokter per 1000 penduduk; SKLHPDDK = Rasio gedung sekolah SLTA per penduduk; MG = Rasio murid dan guru tingkat SLTA; TTIDPDDK= Rasio jumlah tempat tidur di rumah sakit per 1.000.000 penduduk; Dfis= Desentralisasi fiskal; Dfung = Desentralisasi fungsional; DP = Desentralisasi personal; TK = Jumlah tenaga kerja; Invest = Investasi;  $\hat{a}$ ,  $\hat{a}$ ,  $\hat{a}$ ,  $\hat{\epsilon}$ ,  $\hat{n}$  = koefisien regresi;  $\hat{a}$  = error term (gangguan).

### Teknik Estimasi, Evaluasi Model dan Uji Kriteria Statistik

Dalam penelitian ini akan digunakan tiga teknik estimasi yaitu: metode PLS (*Panel Least Square*) atau

dikenal dengan model *Common Effect*, model *Fixed Effect*, dan model *Random Effect*. Setelah itu akan dilakukan pengujian kesesuaian model dengan menggunakan uji: *Chow Test*, *Hausman Test* dan *Langrange Multiplier (LM) test*. Sementara itu, uji kriteria statistik yang dilakukan meliputi penaksiran koefisien determinasi ( $R^2$ ), uji signifikansi parsial dengan Uji t dan uji koefisien regresi secara menyeluruh dengan Uji F.

### C. KONSEP DESENTRALISASI

Selama beberapa dekade terakhir, kecenderungan yang jelas telah muncul di banyak negara adalah terjadinya peralihan manajemen pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Desentralisasi sendiri secara umum didefinisikan sebagai pelimpahan kewenangan (*transfer of authority*) dalam penanganan fungsi publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara Cheema dan Rondinelli (1983) memberikan definisi yang lebih luas berupa: “*The transfer of responsibility for planning, management, and resource-raising and allocation from the central government to (a) field units of central government ministries or agencies; (b) subordinate units or levels of government; (c) semi-autonomous public authorities or corporations; (d) area-wide regional or functional authorities; or (e) NGOs/PVOs*”.

Pada konteks negara kesatuan (*unitary state*), kebijakan pemberian otonomi kepada daerah merupakan kebijakan tipikal yang banyak terjadi

seperti halnya di Indonesia. Di sini pemberian kewenangan didasarkan atas beberapa justifikasi. *Pertama*, dalam negara kesatuan, pemberian otonomi sesungguhnya merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagai satu kesatuan bangsa, bukan sebagai kedaulatan berbagai kelompok masyarakat bangsa yang berdiri sendiri-sendiri. *Kedua*, adanya kenyataan bahwa pemerintah pusat tidak akan cukup mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat yang sangat beragam dan dalam rentang geografis yang sangat jauh. Berdasarkan hal-hal tersebutlah, selanjutnya, pemerintah pusat mendesentralisasikan kewenangannya kepada daerah agar daerah dapat memenuhi kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat secara lebih efektif dan efisien. Keefektifan dan keefisienan ini dikarenakan pemerintah daerah dinilai lebih memahami kebutuhan (*needs*) dan preferensi (*preference*) dari masyarakat yang ada di wilayah yurisdiksinya.

Pada prinsipnya, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam sistem NKRI. Otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, yang berarti mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah (*regional disparity*). Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan

pemerintah pusat demi tegaknya NKRI.

Merunut pada sejarah panjang pemberlakuan kebijakan desentralisasi di Indonesia, selama ini yang dikenal dengan istilah “big bang” desentralisasi adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 pada tanggal 1 Januari 2001 yang kemudian digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004. Sejak itu manajemen pemerintahan di Indonesia telah berubah dari sistem terpusat ke sistem desentralisasi. Dalam kebijakan desentralisasi ini, pemerintah daerah berperan sebagai “pemain utama” dalam pembangunan daerah, termasuk dalam memberikan pelayanan publik.

Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah ini selanjutnya berimplikasi pada adanya penyerahan sumber daya baik berupa dana (finansial), sarana dan personil. Dalam konteks finansial, kebijakan desentralisasi telah membawa perubahan mendasar dalam sistem manajemen keuangan (*fiskal*) di daerah. Hal ini terlihat dari besarnya sumber pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bentuk transfer atau dana perimbangan (*intergovernmental system*). Konsekuensi di bidang fiskal yang lain adalah bahwa pemerintah daerah kini diberi wewenang untuk menarik pajak dan retribusi dan juga memperoleh bagi hasil baik dari pajak maupun dari sumber daya alam (*revenue assignment*). Selain itu, kebijakan desentralisasi juga berimplikasi pada meningkatkan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya sesuai dengan sektor-sektor prioritas dalam

wilayah yurisdiksi mereka (*expenditure and budgeting assignment*). Selanjutnya, implikasi lain dari adanya transfer kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah juga harus diikuti dengan transfer sumber daya sarana dan personil yang dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan kepada daerah.

#### D. INDIKATOR DESENTRALISASI

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa desentralisasi terdiri dari tiga aspek yang saling berkaitan satu sama lain: *politik, administratif* dan *fiskal*. Di antara ketiganya, desentralisasi fiskal lah yang paling banyak dibahas pada berbagai studi kuantitatif. Dalam berbagai studi terkait, untuk mengukur desentralisasi fiskal di suatu daerah, variabel yang seringkali digunakan adalah pengeluaran (*expenditure*) dan penerimaan (*revenue*). Ebel dan Yilmaz (2002) menyatakan bahwa terdapat variasi dalam pemilihan indikator untuk mengukur derajat desentralisasi antara negara yang satu dengan negara yang lain. Artinya, meskipun sama-sama menggunakan variabel pengeluaran dan penerimaan pemerintah, variabel ukuran yang digunakan dapat berbeda-beda.

Beberapa studi terdahulu menggunakan variabel-variabel pengukuran derajat desentralisasi fiskal yang sangat bervariasi. Dari sisi penerimaan (*revenue*), beberapa pendekatan (*proxy*) yang digunakan misalnya variabel *share PAD (own-source revenue)* terhadap total pendapatan daerah dan *share dana transfer* terhadap total pendapatan

(Elhiraika, 2007); persentase penerimaan pajak daerah dibagi dengan total penerimaan pajak nasional (Hong, 2011); *Share PAD* terhadap total penerimaan daerah, *share* dana bagi hasil (*revenue sharing*) terhadap total penerimaan daerah, dan *share* dana perimbangan terhadap total penerimaan daerah (Altito (2010), Tasrin (2011), Jin Jin dan Heng-fu, Zou (2000), Slinko, Irina (2002)).

Sementara itu, beberapa variabel dari sisi pengeluaran (*expenditure*) yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal pada beberapa kajian sebelumnya, antara lain: persentase alokasi APBD (*budget allocation*) untuk sektor pendidikan terhadap total pengeluaran daerah (Tasrin, 2011); rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran nasional (Jin Jin dan Heng-fu, Zou (2000); Slinko, Irina (2002)).

Sebenarnya, penggunaan indikator pendapatan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*) sebagai *proxy* untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal mengandung kelemahan. Hal ini dinyatakan oleh Ebel dan Yilmaz (2002) serta Slinko (dalam Siagian, Altito R. (2010). Penjelasan mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

*The problem with the expenditure decentralization is that local government usually does not have real degree of autonomy but act on behalf of the regional and federal government. We also have problems with the revenue side estimation of fiscal decentralization since those also could be not the consequence of*

*municipal ability to rise and assign taxes, but the consequence of the revenue-sharing policy of regional government.*

Namun demikian, dalam penelitian ini, pendekatan dari sisi penerimaan (*revenue*) masih akan dijadikan sebagai variabel *proxy* untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal. Adapun variabel yang akan digunakan adalah share Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah, sebagaimana digunakan dalam penelitian Jin Jin dan Heng-fu, Zou (2000), Slinko (2002); Elhiraika (2007); Altito (2010), Tasrin (2011). Penggunaan variabel ini didasarkan atas justifikasi bahwa PAD adalah alat ukur kemandirian daerah. Semakin tinggi share PAD terhadap total penerimaan daerah berarti semakin besar kemampuan daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya. Di sini, PAD mencerminkan *local taxing power* yang “cukup” sebagai *necessary condition* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas (Altito, 2010). Hal ini karena pajak daerah (*local tax*) dan retribusi daerah merupakan sumber utama dalam PAD.

Selanjutnya, selain aspek penerimaan (*revenue*), kajian ini juga akan menggunakan variabel dari aspek pengeluaran (*expenditure*) yaitu rasio pengeluaran daerah terhadap pengeluaran nasional. Variabel ini juga digunakan oleh Hong (2011) dalam penelitiannya yang mengambil studi kasus Korea Selatan, hanya saja Hong menempatkan variabel ini bukan sebagai bagian dari variabel desentralisasi fiskal melainkan

merupakan penjelasan dari variabel fungsional.

Adanya kelemahan penggunaan variabel desentralisasi fiskal sebagai satu-satunya variabel yang digunakan untuk mengukur derajat desentralisasi, sedikit banyak telah dijawab oleh Hong (2011) melalui penggunaan beberapa variabel lain diluar variabel desentralisasi fiskal. Hal ini mengacu pada pernyataan Zimmerman yang berpendapat bahwa definisi desentralisasi harus diukur bukan dengan indeks tunggal, tetapi oleh beberapa indeks yang saling terkait. Di sini dan Zimmerman dalam Hong (2011) mengklasifikasikan desentralisasi menjadi empat dimensi *struktur, fungsi, keuangan, dan personil*. Mengacu pada konsep desentralisasi Zimmerman ini, penelitian Hong (2011), meniadakan aspek struktural dan menggunakan tiga dimensi lainnya yaitu: *dimensi fungsi, keuangan dan personil*.

Dalam kerangka penelitian yang lebih komprehensif, penelitian ini akan mengadopsi pendekatan yang dilakukan dalam penelitian Hong (2011), yang selain menggunakan dimensi desentralisasi fiskal juga menggunakan dimensi desentralisasi fungsional dan desentralisasi personil. Adapun variabel yang menjadi *proxy* dari dimensi fungsional adalah sama dengan variabel desentralisasi fiskal dari aspek pengeluaran (*expenditure*) yaitu rasio pengeluaran daerah terhadap total pengeluaran nasional. Hal ini didasarkan atas justifikasi bahwa esensi dari desentralisasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah berupa penyerahan kewenangan (*transfer of authority*) penanganan fungsi publik dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini berarti, pasca implementasi kebijakan desentralisasi, daerah memiliki kewenangan-kewenangan untuk melakukan pembangunan di daerahnya. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, saat ini kewenangan pemerintah pusat meliputi enam bidang yaitu politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama, sementara kewenangan pemerintah daerah meliputi: (1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; (2) perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; (3) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; (4) penyediaan sarana dan prasarana umum; (5) penanganan bidang kesehatan; (6) penyelenggaraan pendidikan; (7) penanggulangan masalah sosial; (8) pelayanan bidang ketenagakerjaan; (9) fasilitas pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah; (10) pengendalian lingkungan hidup; (11) pelayanan pertanian; (12) pelayanan kependudukan dan catatan sipil; (13) pelayanan administrasi umum pemerintahan; (14) pelayanan administrasi penanaman modal; (15) penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; (16) urusan wajib lainnya yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan.

Selanjutnya, daerah harus menyusun pengeluaran pemerintah dalam rangka membiayai berbagai aktivitas atau fungsi yang menjadi tanggungjawabnya. Di sini, dalam mengalokasikan pembelanjaan atas sumber-sumber penerimaannya terkait dengan fungsi desentralisasi, daerah memiliki kebijakan penuh untuk menentukan besaran dan sektor apa

yang akan dibelanjakan (kecuali transfer DAK yang digunakan untuk kebutuhan khusus) yang dituangkan dalam APBD. APBD pada dasarnya memuat rancangan keuangan yang diperoleh dan dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum selama satu tahun anggaran. Rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran nasional inilah yang selanjutnya dijadikan proxy dari dimensi desentralisasi fiskal (aspek pengeluaran) atau oleh Hong (2011) disebut sebagai bagian dari dimensi desentralisasi fungsional.

Selanjutnya, terkait dengan dimensi desentralisasi personil, kajian ini menggunakan pendekatan variabel rasio jumlah PNS daerah terhadap PNS pusat. Adapun alasan penggunaan variabel ini adalah bahwa adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah akan berimplikasi pada kebutuhan pelimpahan sumber daya baik keuangan, personil, maupun sarana dan prasarana.

#### **E. INDIKATOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Sama halnya dengan istilah desentralisasi, pendefinisian aspek kesejahteraan masyarakat juga sangat beragam. Dalam pemahaman sempit, kesejahteraan masyarakat sering kali didekati dengan menggunakan *proxy* PDB per kapita. Namun pada beberapa tahun terakhir ini, penggunaan PDB per kapita (dan juga turunannya) sebagai satuan ukuran yang kerap digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, telah mengundang

perdebatan di berbagai kalangan. Hal ini karena seringkali terjadi ketidaksinkronan antara angka dan realitas “kesejahteraan” yang terjadi di masyarakat. Persoalan inilah yang selanjutnya menyebabkan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy, pada Februari 2008, -yang tidak puas dengan kondisi info statistik mengenai perekonomian dan masyarakat saat itu- meminta Joseph Stiglitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi untuk membentuk Komisi Pengukuran Kinerja Ekonomi dan Kemajuan Sosial (CMEPSP). Pembuatan komisi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi keterbatasan PDB sebagai indikator kinerja ekonomi dan kemajuan sosial.

Beberapa penelitian terdahulu juga telah mencoba menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat. Trend terbaru menafsirkan bahwa konsep kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dalam arti luas dimaknai sebagai suatu kondisi dimana tercapai kualitas hidup yang baik atau kecukupan kebutuhan dasar manusia. Liu dalam Hong (2011) adalah contoh kasus yang menggunakan pendekatan kualitas hidup untuk mengukur tingkat pembangunan daerah. Di sini, Liu membangun lima dimensi kualitas hidup seperti ekonomi, politik, lingkungan, kesehatan dan pendidikan, dan sosial, dan kemudian memilih 123 indikator untuk lima dimensi tersebut.

Jika konsep kesejahteraan masyarakat ditafsirkan sebagai konsep kualitas hidup maka penjelasan mengenai konsep ini harus diartikan sebagai konsep yang sangat luas yang mencakup dimensi kepuasan psikologis, kebahagiaan, dan

kesehatan. Senada dengan hal tersebut, penelitian Hong (2011) juga mencoba mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah dari sudut pandang kualitas hidup melalui 8 indikator, yang terbagi atas 4 dimensi yaitu: ekonomi regional, infratraktur, sumber daya manusia, dan kesehatan dan kesejahteraan.

Selanjutnya, dalam pendefinsian kesejahteraan masyarakat dalam kajian ini akan mengikuti pendefinsian menurut Hong (2011) yang tidak hanya menggunakan indikator PDRB per kapita sebagai satu-satunya indikator yang menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat, namun juga meliputi beberapa dimensi terkait dengan pelayanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Hal inilah yang menjadikan *positioning* kajian ini dalam konstelasi kajian-kajian sejenis yang pernah dilakukan, sebagai salah satu kajian yang menggunakan pendekatan yang cukup komprehensif.

## F. HASIL ESTIMASI

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tiga teknik estimasi model regresi data panel yang dapat digunakan yaitu model dengan PLS (*Common Effect*), model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Dalam penelitian ini, ketiga teknik estimasi tersebut dibuat semua untuk selanjutnya dilakukan uji untuk menentukan teknik estimasi mana yang paling tepat. Selanjutnya, berikut ini disajikan ketiga hasil estimasi tersebut.

### Estimasi Dengan Pendekatan PLS (Common Effect)

Teknik estimasi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah dengan menggunakan metode PLS atau yang juga dikenal dengan *Common Effect*. Pendekatan PLS tidak memperhatikan dimensi

individu maupun waktu. Di sini digunakan asumsi bahwa perilaku data antar unit analisis, berupa kabupaten dan kota, memiliki kesamaan dalam berbagai kurun waktu. Lebih lanjut, hasil regresi PLS ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pencapaian IPM Beberapa Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat

Variabel Dependent	Variabel Independent			Variabel Kontrol		R <sub>2</sub>
	Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
PDRB per kapita	51.12054*	17.59245	-3975.563*	129.9628***	71.11486***	0.120099
Panjang Jalan per kapita	0.000158	-0.000124	-0.257653***	-0.000710*	0.001552***	0.307635
Jumlah Gedung Sekolah SLTA	-14.76203	-448.7142**	12526.50	1803.278***	610.6346***	0.094536
Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA	0.161725	-0.037405	-0.25.78469	-0.030311	0.289502***	0.004175
Jumlah dokter per 1000 penduduk	0.000567*	-0.000162	-0.155716***	-0.000170	0.001294***	0.146739
Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk	-25.22147*	-12.55769*	8700.701***	-27.46956*	12.89189***	0.322758

Catatan: \* p < 0.1; \*\* p < 0.05; dan \*\*\* p < 0.01

Sumber: Hasil Estimasi

### Estimasi Dengan Pendekatan Fixed Effect

Pada pendekatan yang pertama digunakan asumsi bahwa intersep dan slope adalah sama baik antar waktu maupun antar unit analisis kabupaten/kota. Namun demikian, penggunaan asumsi ini sebenarnya kurang realistis mengingat adanya perbedaan karakteristik antar kabupaten/kota baik dilihat dari potensi sumber daya alam, karakteristik sosial budaya penduduk, maupun karakteristik manajemen pemerintahan. Oleh karenanya, berbagai perbedaan karakteristik ini semestinya diakomodasi dalam model. Salah satu caranya adalah dengan

merubah asumsi bahwa intersep adalah berbeda antar unit analisis kabupaten/kota sedangkan slope antar unit analisis kabupaten/kota tetap sama. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan tersebut dikenal dengan model regresi *Fixed Effect*. Adapun hasil regresi *Fixed Effect* ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Fixed Effect

Variabel Dependent	Koefisien	Variabel Independent			Variabel Kontrol		R <sup>2</sup>
		Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
PDRB per kapita	4350,448***	-3.125224	-1.917685	799.3844	30.45513***	20.15609***	0.160517
Panjang Jalan per kapita	0.072193**	4.26E-06	8.50E-06	-0.137906**	-0.000116	0.000290	0.047097
Jumlah Gedung Sekolah SLTA	-65260.80	41.87001	-527.6597**	32323.72	2085.952***	1255.161*	0.112699
Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA	62.10996	0.106361	-0.015840	-32.38579	-0.174260	-0.369508	0.020052
Jumlah dokter per 1000 penduduk	0.162822***	0.000141	-9.91E-05	-0.127155***	-3.33e-05	-0.000596*	0.232036
Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk	-122.5091	-14.24296	-2.012269	8483.833***	-11.19679	11.55429	0.305114

Catatan: \* p < 0.1; \*\* p < 0.05; dan \*\*\* p < 0.01

Sumber: Hasil Estimasi

### Estimasi Dengan Pendekatan Random Effect

Pada pendekatan ini, digunakan variabel residual yang menganggap bahwa residual mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa

intersep adalah variabel random atau stokastik. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi model *Random Effect* adalah *Generalized Least Squares (GLS)*. Adapun hasil regresi *Random Effect* ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Regresi Random Effect

Variabel Dependent	Koefisien	Variabel Independent			Variabel Kontrol		R <sup>2</sup>
		Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
PDRB per kapita	4033.835***	-3.458544	-1.936252	1612.280	29.82069***	21.11355***	0.982458
Panjang Jalan per kapita	-0.008890	-1.44E-05	3.44E-05	0.063108	-5.49E-05	0.000486	0.886199
Jumlah Gedung Sekolah SLTA	-288385.0**	-3.370697	-520.3765**	580396.7**	2304.431***	1754.948**	0.347784
Rasio Murid dan Guru tingkat SLTA	99.13308	-0.055260	-0.057271	-179.0147	-0.194527	-0.232580	0.148431
Jumlah dokter per 1000 penduduk	0.108354**	0.000111	-8.55E-05	0.003531	3.44E-05	-0.000448	0.796001
Jumlah tempat tidur per 1,000,000 penduduk	1868.388	-12.44986	-0.770172	4832.916	-8.093969	1.154147	0.800939

Catatan: \* p < 0.1; \*\* p < 0.05; dan \*\*\* p < 0.01

Sumber: Hasil Estimasi

Setelah melakukan estimasi dengan ketiga pendekatan tersebut di atas, selanjutnya akan ditentukan, pendekatan manakah yang paling tepat untuk digunakan. Untuk keperluan ini,

penelitian ini akan menggunakan 3 (tiga) macam uji yaitu: a) *Uji Chow*, digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa variabel dummy atau *Fixed Effect*; b) *Uji Hausman*,

digunakan untuk memilih antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*; dan c) Uji *Langrange Multiplier (LM)* digunakan untuk memilih antara PLS tanpa

variabel dummy atau *Random Effect*. Adapun hasil ketiga uji tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Kompilasi Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji LM

Model	Hasil Uji			Kesimpulan
	Chow Test	Hausman Test	LM Test	
Model 1	0.0000 (Fixed Effect)	0.0809 (Random Effect)	0.0000 (Random Effect)	Random Effect
Model 2	0.0000 (Fixed Effect)	0.0063 (Fixed Effect)	0.0000 (Random Effect)	Fixed Effect
Model 3	0.0050 (Fixed Effect)	0.1141 (Random Effect)	0.0008 (Random Effect)	Random Effect
Model 4	0.6703 (OLS/Common Effect)	0.5091 (Random Effect)	0.5098 (OLS/Common Effect)	OLS/Common Effect
Model 5	0.0000 (Fixed Effect)	0.1470 (Random Effect)	0.0000 (Random Effect)	Random Effect
Model 6	0.0000 (Fixed Effect)	0.0025 (Fixed Effect)	0.0000 (Random Effect)	Fixed Effect

Sumber: Hasil Estimasi

## G. HASIL ANALISIS

Berdasarkan hasil uji sebagaimana terlihat pada Tabel 4,

maka selanjutnya untuk kemudahan proses analisis akan mengacu pada Tabel 5.

Tabel 5. Kompilasi Kesesuaian Model Yang Digunakan

Variabel Dependent	Koefisien	Variabel Independent			Variabel Kontrol		R <sup>2</sup>
		Desentralisasi Fiskal	Desentralisasi Fungsional	Desentralisasi Personnel	Investasi	Tenaga Kerja	
Model 1	4033.835***	-3.458544	-1.936252	1612.280	29.82069***	21.11355***	0.982458
Model 2	0.072193**	4.26E-06	8.50E-06	-0.137906**	-0.000116	0.000290	0.047097
Model 3	-288385.0**	-3.370697	-520.3765**	580396.7**	2304.431***	1754.948**	0.347784
Model 4		0.161725	-0.037405	-0.25.78469	-0.030311	0.289502***	0.004175
Model 5	0.108354**	0.000111	-8.55E-05	0.003531	3.44E-05	-0.000448	0.796001
Model 6	-122.5091	-14.24296	-2.012269	8483.833***	-11.19679	11.55429	0.305114

Catatan: \* p < 0.1; \*\* p < 0.05; dan \*\*\* p < 0.01

Model 1, 3, 5 menggunakan *Random Effect*, Model 2 dan 6 menggunakan *Fixed Effect*, dan Model 4 menggunakan *OLS/Common Effect*.

Sumber: Hasil Estimasi

### Analisis Model 1

Dari Tabel 5, terlihat bahwa pengaruh langsung antara derajat desentralisasi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi tidak ada. Hal ini terlihat dari tidak adanya variabel desentralisasi yang signifikan mempengaruhi variabel ekonomi wilayah yang

diwakili oleh variabel PDRB per kapita. Dan bila dilihat dari keberadaan variabel kontrol, maka terlihat jelas bahwa baik variabel investasi maupun variabel tenaga kerja mempunyai koefisien yang signifikan secara statistik dengan uji t pada  $\alpha = 1\%$  dan memiliki tanda/sign positif. Ini berarti bahwa perubahan pada kedua variabel

kontrol tersebut memiliki pengaruh positif terhadap perekonomian wilayah. Tingginya pengaruh variabel investasi dan variabel tenaga kerja ini, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Berdasarkan teori Fungsi Produksi Neo Klasik, tenaga kerja merupakan salah satu faktor input, selain modal, yang menentukan produktifitas. Pada skala makro, tenaga kerja merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, karena tenaga kerja akan menghasilkan pendapatan, dan pendapatan yang dihasilkan setiap individu tenaga kerja ini disebut sebagai pendapatan per kapita. Selain itu, tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi. Dan peningkatan marginal produksi akan terus berambah jika jumlah tenaga kerja terus bertambah hingga mencapai jumlah produksi maksimal.
- Investasi, baik yang berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) diyakini merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan pengungkit (*leverage*) pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan investasi akan menambah jumlah barang modal yang selanjutnya menentukan produktifitas.

Meskipun tidak ada pengaruh langsung antara ketiga variabel desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun disinyalir terdapat pengaruh tidak langsung variabel ini melalui saluran (*channel*) investasi, dimana tingginya investasi di daerah dijustifikasi sebagai bentuk kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0.98258 berarti model 1 mampu menjelaskan variasi kemajuan pertumbuhan bidang ekonomi sebesar 98,26%, namun demikian, pengaruh ini tidak berasal dari variabel desentralisasi.

#### Analisis Model 2

Dari Tabel 5 juga terlihat bahwa hanya variabel desentralisasi personil yang memiliki koefisien yang signifikan melalui uji t pada  $\alpha = 5\%$ . Variabel ini bertanda negatif, artinya bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar satu unit maka akan terjadi penurunan rasio panjang jalan yang berkualitas baik. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh besarnya jumlah PNS yang direkrut oleh daerah setiap tahun sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi. Akibatnya saat ini terjadi pembengkakan anggaran rutin yang dialokasikan untuk gaji dan tunjangan PNS daerah, sementara anggaran pembangunan infrastruktur jalan menjadi terkendala. Di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi, sehingga dengan minimnya pembangunan jalan yang dilakukan dalam kurun 6 tahun terakhir, maka rasio panjang jalan berkualitas baik per penduduk semakin kecil. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang sangat

kecil, yaitu sebesar 0.047097, maka dapat dikatakan bahwa model 2 hanya mampu menjelaskan variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik sebesar 5%. Ini berarti bahwa sekitar 95% variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model ini.

### Analisis Model 3

Tabel 5 juga menjelaskan bahwa terdapat dua variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas yang diwakili oleh variabel jumlah gedung sekolah SLTA per penduduk. Kedua variabel desentralisasi dimaksud adalah *variabel desentralisasi fungsional*, yang didekati dengan variabel rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional, dan *variabel desentralisasi personil* yang diwakili oleh variabel rasio PNS daerah terhadap PNS pusat. Adapun tingkat signifikansi kedua variabel ini adalah pada tingkat kepercayaan 95% atau  $\alpha = 5\%$ . Namun demikian, kedua variabel ini memiliki pengaruh yang berbeda.

*Variabel desentralisasi fungsional* bertanda *negatif*, artinya, peningkatan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional sebesar 1 unit akan mempengaruhi penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Karena variabel dependen pada model ini berbentuk rasio atau perbandingan maka penurunan rasio jumlah sekolah

SLTA per penduduk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, *pertama*, jumlah sekolah SLTA tetap sementara jumlah penduduk meningkat; *kedua*, jumlah sekolah SLTA dan jumlah penduduk sama-sama mengalami peningkatan tapi dengan laju pertumbuhan yang berbeda, dimana laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan jumlah sekolah SLTA. Untuk konteks Provinsi Jawa Barat, penjelasan kedua tersebut disinyalir merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk. Selain dikarenakan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat yang tergolong tinggi yaitu 1,89 persen pada tahun 2010 yang diakibatkan oleh arus urbanisasi maupun karena pertumbuhan alamiah berupa tingkat kelahiran (*natalitas*). Di sisi lain, laju pertumbuhan jumlah sekolah SLTA di Provinsi Jawa Barat tidak terlalu banyak. Hal ini disebabkan oleh karena pemerintah daerah sesungguhnya lebih banyak terfokus pada pengembangan pendidikan tingkat dasar (SD) dan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang merupakan bagian dari program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan secara nasional dibandingkan pembangunan sekolah tingkat SLTA.

*Variabel desentralisasi personil* bertanda *positif*, artinya, peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah sekolah per penduduk. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: di era desentralisasi, pemerintah daerah banyak yang melakukan rekrutmen PNS, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen tenaga pengajar atau guru

di tingkat SLTA. Sebagai akibat dari banyaknya tenaga pengajar/guru ini selanjutnya pemerintah membangun fasilitas pendidikan berupa gedung sekolah, sehingga rasio jumlah sekolah per penduduk mengalami peningkatan.

Sementara, kedua variabel kontrol, yaitu variabel investasi dan tenaga kerja, masing-masing bertanda *positif* dan secara statistik signifikan melalui uji  $t$  pada  $\alpha = 1\%$  dan  $\alpha = 5\%$  secara berurutan. Ini berarti bahwa perubahan pada kedua variabel ini memiliki pengaruh terhadap perubahan rasio jumlah sekolah per penduduk. Hal ini karena peningkatan investasi ini juga mencakup investasi di sektor pendidikan, yang akibatnya *demand* terhadap tenaga pengajar/guru untuk tingkat SLTA juga meningkat. Sedangkan nilai koefisien determinasi sebesar 0.347784 berarti model mampu menjelaskan variasi rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk sebesar 34,78%.

#### Analisis Model 4

Berbeda dengan kelima model lainnya, setelah melalui serangkaian test, pendekatan yang paling cocok untuk model 4 adalah menggunakan metode PLS atau *Common Effect*. Sebagaimana terlihat pada tabel 2, tidak ada satupun variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio murid dan guru tingkat SLTA. Hanya saja variabel tenaga kerja yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, memiliki signifikansi pada  $\alpha = 1\%$ . Sama halnya dengan penjelasan pada model 3, ketidak-signifikan variabel desentralisasi pada model ini disebabkan oleh karena pemerintah daerah lebih banyak terfokus pada

pengembangan pendidikan tingkat dasar (SD) dan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang merupakan bagian dari program wajib belajar 9 tahun. Sampai dengan saat ini, pemerintah daerah banyak melakukan rekrutmen guru untuk tingkat SD dan SLTA selain juga melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal kesejahteraan guru di tingkat ini. Sebenarnya, rekrutmen guru pada tingkat SLTA tetap dilakukan hanya saja jumlahnya tidak sebanyak pada tingkat SD dan SMP. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang sangat kecil, yaitu sebesar 0.004175, maka dapat dikatakan bahwa model 4 hanya mampu menjelaskan variasi rasio murid dan guru tingkat SLTA sebesar 0.4%. Ini berarti bahwa sekitar 99.6% variasi rasio murid dan guru tingkat SLTA dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model ini.

#### Analisis Model 5

Sama halnya dengan model 4, dalam model 5, ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0.796001, maka dapat dikatakan bahwa meskipun variabel-variabel pada model 5 tidak signifikan, namun secara bersamaan, model ini mampu menjelaskan variasi rasio dokter per 1000 penduduk sebesar 79.60%. Ini berarti hanya sekitar 20.40% variasi rasio dokter per 1000 penduduk dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model ini.

### Analisis Model 6

Sementara itu, untuk model 6, variabel desentralisasi personil bertanda positif dan secara statistik signifikan melalui uji t pada  $\alpha = 1\%$ . Ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu sebesar 0.305114, maka dapat dikatakan bahwa model 6 hanya mampu menjelaskan variasi rasio jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk sebesar 30.51%.

### H. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, maka beberapa kesimpulan yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

**Di bidang ekonomi**, variabel desentralisasi belum menunjukkan pengaruhnya secara langsung, baik dilihat dari variabel *desentralisasi fiskal*, *desentralisasi fungsional* maupun *desentralisasi personil*. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien dari variabel desentralisasi yang signifikan mempengaruhi variabel ekonomi wilayah yang diwakili oleh variabel PDRB per kapita. Adapun determinan yang secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah dijelaskan oleh keberadaan variabel kontrol, yaitu *variabel investasi* maupun *variabel tenaga kerja* dimana masing-masing variabel memiliki signifikansi secara statistik dengan uji t pada  $\alpha = 1\%$  dan memiliki tanda/sign positif. Ini berarti bahwa

pada kondisi *ceteris paribus*, peningkatan rasio investasi terhadap PDRB dan peningkatan rasio tenaga kerja terhadap angkatan kerja sebesar 1 unit, masing-masing akan mengakibatkan peningkatan PDRB per kapita sebesar nilai koefisiennya sebagaimana terlihat pada model 1. Signifikansi dan besarnya pengaruh variabel investasi dan variabel tenaga kerja ini dapat dijelaskan oleh teori Fungsi Produksi Neo Klasik dimana baik modal (investasi) dan tenaga kerja merupakan faktor input yang menentukan produktifitas. Terkait dengan hal ini, meskipun tidak ada keterkaitan langsung antara ketiga variabel desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi, namun disinyalir terdapat keterkaitan tidak langsung variabel ini melalui saluran (*channel*) investasi, dimana tingginya investasi di daerah dijustifikasi sebagai bentuk peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menarik investasi. Selanjutnya, bila dilihat dari nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), sebesar 0.98258, menunjukkan bahwa model 1 mampu menjelaskan variasi kemajuan pertumbuhan bidang ekonomi daerah sebesar 98,26%, namun demikian, pengaruh ini tidak berasal dari variabel desentralisasi, tetapi berasal dari variabel investasi dan variabel tenaga kerja.

**Di bidang infrastruktur**, hanya *variabel desentralisasi personil* yang memiliki pengaruh terhadap perubahan variabel infrastruktur jalan. Namun demikian, pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel desentralisasi personil adalah negatif. Ini berarti bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar satu unit maka akan

terjadi penurunan rasio panjang jalan yang berkualitas baik sebesar nilai koefisiennya. Disinyalir, hal ini disebabkan oleh karena pasca pemberlakuan kebijakan desentralisasi, daerah-daerah mulai melakukan *recruitmen* PNS setiap tahunnya. Akibatnya jumlah PNS daerah semakin banyak dan menyebabkan pembengkakan kebutuhan anggaran rutin untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS daerah. Hal ini selanjutnya berimplikasi pada semakin menurunnya anggaran pembangunan infrastruktur jalan. Sementara itu, di sisi lain, laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat tergolong tinggi, sehingga dengan minimnya pembangunan jalan yang dilakukan dalam kurun 6 tahun terakhir, maka rasio panjang jalan berkualitas baik per penduduk semakin kecil. Selanjutnya, bila dilihat dari koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang sangat kecil, yaitu sebesar 0.047097, maka dapat dikatakan bahwa model 2 hanya mampu menjelaskan variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik sebesar 5%. Ini berarti bahwa sekitar 95% variasi pertumbuhan infrastruktur jalan berkualitas baik dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat di dalam model 2.

**Di bidang Pendidikan**, terdapat dua variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap aksesibilitas masyarakat pada bidang pendidikan tingkat menengah ke atas. Kedua variabel desentralisasi dimaksud adalah *variabel desentralisasi fungsional* dan *variabel desentralisasi personil*. Namun demikian, kedua variabel ini memiliki pengaruh yang

berbeda yang ditunjukkan oleh koefisien variabel desentralisasi fungsional yang bertanda *negatif* dan koefisien variabel desentralisasi personil yang bertanda *positif*. Tanda negatif dari variabel desentralisasi fungsional ini menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah secara nasional sebesar 1 unit akan menyebabkan terjadinya penurunan rasio jumlah sekolah SLTA per penduduk sebesar koefisiennya. Sementara itu, tanda positif dari variabel desentralisasi personil menunjukkan bahwa bila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah sekolah per penduduk sebesar koefisiennya. Selain model 3, model 4 juga menjelaskan tentang pengaruh variabel desentralisasi di bidang pendidikan yang dilihat dari kualitas pendidikan tingkat menengah ke atas yang diwakili oleh variabel dependent berupa rasio murid dan guru. Di dalam model 4 ini, ditemukan bahwa tidak ada satupun variabel desentralisasi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap rasio murid dan guru tingkat SLTA. Hanya saja variabel tenaga kerja yang merupakan variabel kontrol dalam penelitian ini, memiliki signifikansi pada  $\alpha = 1\%$ . Ketidak-signifikanan variabel desentralisasi pada model ini disinyalir disebabkan oleh karena pemerintah daerah lebih banyak terfokus pada pengembangan pendidikan tingkat dasar (SD) dan pendidikan tingkat menengah pertama (SMP) yang merupakan bagian dari program wajib belajar 9 tahun, sehingga rekrutmen guru SD dan

SLTA lebih banyak dibandingkan guru SLTA.

*Di bidang kesehatan ,*

ditemukan bahwa variabel desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan rasio jumlah dokter per 1000 penduduk. Namun demikian, untuk model 6 dengan variabel dependent berupa rasio tempat tidur di Rumah Sakit terhadap, terlihat bahwa variabel desentralisasi personil signifikan dan bertanda positif. Ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan rasio PNS daerah terhadap PNS pusat sebesar 1 unit akan mempengaruhi peningkatan rasio jumlah tempat tidur di Rumah Sakit per 1.000.000 penduduk.

Selanjutnya, terkait dengan saluran (*channel*) dari variabel desentralisasi yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat disimpulkan bahwa variabel desentralisasi fungsional dan variabel desentralisasi personil merupakan saluran (*channel*) yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun demikian kinerja kedua saluran (*channel*) inipun tetap harus ditingkatkan untuk kedepannya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan beberapa saran yang mengarahkan Pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk memaksimalkan peranannya dalam kerangka meningkatkan keberfungsian dari variabel desentralisasi, baik variabel desentralisasi fiskal, fungsional maupun personil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

- Memaksimalkan peranan desentralisasi fiskal dengan

mengoptimalkan kinerja instrumen-instrumen *revenue* yang mampu mendorong terjadinya peningkatan penerimaan daerah (*local revenue*), misalnya melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah.

- Mengoptimalkan peranan desentralisasi fungsional, melalui kebijakan pengalokasian anggaran yang disesuaikan dengan visi dan misi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik.
- Meningkatkan peranan desentralisasi personil melalui upaya-upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka Tahun 2004-2011*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Bandung.
- Bird, R., dan Vaillancourt, F. (1998). *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge University Press, United Kingdom.
- Cheema, G.S. dan Rondinelli, D.A., (1983). *Decentralization and Development: Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills; London; New Delhi: Sage Publications.
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. (2002). *Concept of Fiscal Decentralization and World*

- Wide Overview*. World Bank Institute. Available:<http://www.Worldbank.org>
- Elhiraika, A. B. (2007). Fiscal Decentralization and Public Service Delivery in South Africa. *African Trade Policy Centre, Work in Progress*, No. 58. Didownload dari <http://www.uneca.org/atpc/Work%20in%20progress/58.pdf>.
- Hirawan, Susiyanti. (2007). *Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia*. Pidato pada Pengaugerahan Guru Besar di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 24 Februari 2007.
- Hong, Jun Hyun. (2011). *Does Decentralization Worsen Regional Disparity? The Case of Korea*. Paper yang dipresentasikan pada International Conference on Retrospect and Prospect on Public Affairs of 100th Founding Anniversary of the Republic of China, 27-29 Mei, 2011.
- Jin Jing and Zou, Heng-fu. (2000). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. World Bank Working Paper Series 1452. Available :<http://www.worldbank.org>.
- Oates, William. (1972). *Fiscal Federalism*. New York, NY: Harcourt Brace Jovanovich.
- Pranab, Bardhan., dan Mookherjee, Dilip. (2005). *Decentralization, Corruption and Government Accountability: An Overview*, For Handbook of Economic Corruption edited by Susan Rose-Ackerman, Edward Elgar.
- Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang No. 6 tahun 1974 tentang *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial*.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang *Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota*.
- Slinko, Irina (2002). *The Impact of Fiscal Decentralization on the Budget Revenue Inequality among Municipalities and Growth of Russian Regions*. Centre for Economic and Financial Research, Moscow
- Siagian, Altito R. (2010). *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Wilayah (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.
- Stiglitz, Joseph. E, Sen, Amartya, and Fitoussi, Jean-Paul (diterjemahkan oleh Arumsari, Mutiara dan Bintang Timur, Fitri). (2011). *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur Yang Tepat Untuk Menilai Kemajuan*.
- Tasrin, Krismiyati. (2011). *Study on the Impact of Decentralization Policy on the Quality of Local Public Services in the Education Sector, Case Study: West Java Province, Indonesia*. Kobe University. Tesis.